

**ORASI ILMIAH PENGUKUHAN JABATAN GURU BESAR
BIDANG ILMU MANAJEMEN PEMBANGUNAN WILAYAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**



**STRATEGI KERJA SAMA ANTAR DAERAH YANG BERKELANJUTAN
UNTUK MENINGKATKAN KEBERHASILAN OTONOMI DAERAH
DI INDONESIA**

Oleh:

Prof. Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si.

**Disampaikan pada Sidang Terbuka Senat
Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Pada Tanggal 4 Februari 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI , SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2025**

Bismillahirrokhmanirrokhiiim.
Assalamu'alaikum warokhmatullahi wabarakaatuh.
Salam sejahtera untuk hadirin semuanya.

Yang saya hormati,

Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Jenderal Soedirman;

Ketua, Sekretaris, dan anggota Komisi Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman;

Rektor, dan para Wakil Rektor Universitas Jenderal Soedirman;

Para Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga dan pimpinan unit di Lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;

Para pejabat sipil dan militer tingkat propinsi dan kabupaten;

Para Rektor Perguruan Tinggi;

Para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman; serta

Seluruh hadirin, tamu undangan dan keluarga yang berbahagia.

Alhamdulillah Robbil 'Alamiin, atas berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, kita dapat menghadiri majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia menuju jalan kehidupan yang diridloi Allah SWT.

Hadirin yang saya hormati.

Perkenankanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan pidato ilmiah pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam Bidang Manajemen Pembangunan Wilayah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman dengan judul:

Strategi Kerja Sama Antar Daerah yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Keberhasilan Otonomi Daerah di Indonesia

Topik yang saya pilih dalam dalam pidato pengukuhan ini didasari atas hasil riset dan kajian atas permasalahan rendahnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sebagai instrumen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hadirin yang saya hormati.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, sebagai bentuk implementasi dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Indonesia menghadapi perubahan

kondisi yang sangat penting dan sekaligus mempengaruhi pola pembangunan nasional dan daerah secara keseluruhan. Mulai sejak saat itu, pemerintahan dan pembangunan daerah di seluruh Indonesia telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah yang sangat sentralistis dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan. Pemerintah daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan nasional secara keseluruhan.

Hadirin yang saya hormati.

Kata otonomi berasal dari bahasa Yunani, *outonomous*, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, pengertian otonomi adalah; *the legal self sufficiency of social body and its actual independence* (kemandirian hukum suatu badan sosial dan independensinya). Dengan demikian pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok yaitu; kewenangan untuk membuat hukum sendiri (*own laws*) dan kebebasan untuk mengatur pemerintahan sendiri (*self government*) (Sjafrizal, 2008). Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakekatnya adalah hak atau wewenang suatu daerah untuk mengurus rumah tangga sendiri. Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Ada tiga alasan mengapa otonomi daerah di Indonesia diperlukan (Hidayat, 2008). **Pertama**, adalah *political equality*, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik pada tingkat daerah. Hal ini penting artinya untuk meningkatkan demokratisasi dalam pengelolaan negara. **Kedua** adalah *local accountability*, yaitu meningkatkan kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing daerah. **Ketiga** adalah *local responsiveness*, yaitu meningkatkan tanggungjawab pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial di daerah.

Ketiga alasan di atas menjadi penting karena sistem pemerintahan sentralistik yang selama ini diterapkan di Indonesia justru menimbulkan berbagai permasalahan pembangunan di daerah yang serius, diantaranya: **Pertama**, proses pembangunan daerah secara keseluruhan menjadi kurang efisien dan ketimpangan antar wilayah semakin besar. Keadaan tersebut terjadi karena sistem pembangunan yang terpusat cenderung mengambil kebijakan yang seragam dan mengabaikan perbedaan potensi daerah, baik sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang dimiliki. Daerah yang memiliki potensi sumberdaya yang secara kebetulan sesuai dengan kebijakan nasional

akan dapat bertumbuh dengan cepat. Sedangkan daerah yang potensi sumberdayanya tidak sesuai dengan prioritas pembangunan nasional akan cenderung tertekan pertumbuhan ekonominya. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung melebar sehingga menimbulkan terjadinya keresahan sosial di daerah. **Kedua**, sistem pembangunan yang sangat terpusat menimbulkan ketidakadilan yang sangat besar dalam alokasi sumberdaya nasional, terutama dana pembangunan. Keadaan tersebut dapat dilihat dari banyaknya provinsi yang kaya sumberdaya alam namun tingkat kesejahteraan masyarakatnya ternyata masih sangat rendah dan tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya (Sjafrizal, 2008). Atas dasar hal tersebut pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi di Indonesia sebagai pilihan tata kelola pemerintahan dan pembangunan sebagai pilihan yang tepat.

Hadirin yang saya hormati.

Dalam perspektif politik liberal, desentralisasi akan membantu menyelesaikan banyak permasalahan nasional dan daerah. Bagi kepentingan nasional, desentralisasi dan otonomi daerah akan mengurangi kepadatan dan kemacetan administratif dalam pemerintahan nasional. Desentralisasi juga mengurangi beban pemerintah nasional dalam menangani permasalahan bangsa. Implementasi otonomi daerah akan menjadi arena pembelajaran berpolitik dan berpemerintahan di tingkat daerah untuk mempersiapkan para kader berkualitas. Pelaksanaan otonomi daerah juga sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas berdemokrasi, berpemerintahan dan berpembangunan di tingkat daerah. Karena pengambilan keputusan pemerintahan semakin dekat dengan masyarakat maka penyelenggaraan pemerintahan akan lebih responsif, partisipatif dan akuntabel. Disamping itu, dengan otonomi daerah, masyarakat akan lebih bisa berpartisipasi dalam perumusan dan implementasi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan akan lebih akuntabel terhadap masyarakat, dan diharapkan akan tetap pula akuntabel terhadap pemerintahan nasional (Pratikno, 2007).

Hadirin yang saya hormati.

Di dalam tataran praktek, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ternyata belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan. Kajian dari Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (2013) melaporkan bahwa; (1) Adanya ribuan peraturan daerah (Perda) yang melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga harus dibatalkan oleh pemerintah pusat. (2) Banyak perda dibuat dengan tujuan melakukan pungutan wajib berupa pajak, retribusi atau sumbangan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga menghambat investasi. (3) Banyaknya Perda dibuat sebagai dasar hukum untuk melakukan pungutan pengangkutan barang

antar daerah sehingga menghambat perdagangan lintas daerah. Adanya bukti-bukti ini menjadikan otonomi daerah dianggap sebagai salah satu sebab penghambat pemulihan ekonomi masyarakat, dan hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemberian otonomi daerah (Pratikno, 2007).

Bagi kalangan kelompok pendukung konsep sentralisasi, yang lebih mengutamakan keteraturan regulasi dan kebijakan pemerintahan secara hierarkis, seperti kalangan birokrasi pemerintah pusat dan pebisnis tingkat nasional, desentralisasi dan otonomi daerah diidentikkan dengan kekacauan, fragmentasi dan inkonsistensi (Pratikno, 2007). Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah dianggap sebagai pemicu terciptanya turbulensi tata kelola pemerintahan daerah karena dengan otonomi daerah, pengelolaan pembangunan ekonomi dan pelayanan publik menjadi tidak efisien. Otonomi daerah berpotensi menciptakan terjadinya konflik antar daerah, konflik antar penduduk, serta munculnya sentimen primordial.

Hadirin yang saya hormati.

Kegagalan pelaksanaan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh dua hal. **Pertama**, munculnya permasalahan sosial politik sebagai akibat dari diberlakukannya otonomi daerah. Dalam banyak kasus, otonomi daerah telah dipersepsikan secara beragam oleh beberapa pemerintah daerah. Diantaranya mereka menganggap bahwa otonomi daerah sebagai momentum untuk memenuhi keinginan daerahnya sendiri tanpa memperhatikan konteks yang lebih luas yaitu kepentingan negara secara keseluruhan dan kepentingan daerah lain yang berdekatan. Akibatnya, muncul beberapa gejala negatif yang meresahkan antara lain berkembangnya sentimen primordial, konflik antar daerah, berkembangnya proses KKN, konflik antar penduduk, eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, dan munculnya sikap “ego daerah” yang berlebihan. Pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom cenderung memproteksi seluruh potensinya secara ketat demi kepentingan daerahnya sendiri dan menutup diri terhadap kepentingan kabupaten/kota lainnya. Bahkan dampak negatif kegiatan ekonomi di suatu daerah pada daerah lain, seperti timbulnya eksternalitas tidak lagi dihiraukan. Rasa sentimen daerah juga mulai timbul dengan adanya kecenderungan umum mengangkat “putra daerah” menjadi pegawai negeri sipil daerah (Keban, 2010).

Kedua, hampir setiap daerah menghadapi persoalan ekonomi berupa rendahnya skala ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga setiap daerah menjadi sangat sulit untuk mengembangkan kegiatan perekonomian daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua permasalahan tersebut saling terkait karena timbulnya permasalahan sosial politik di daerah akan semakin memperberat penyelesaian persoalan ekonomi bagi daerah tersebut.

Hadirin yang saya hormati.

Persoalan ekonomi muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemberian otonomi untuk mengatur rumah tangga sendiri tidak disertai dengan adanya kemampuan keuangan secara mandiri dari tiap daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari sisi kemampuan daerah dalam menyediakan pembiayaan pembangunan yang dilakukan secara mandiri. Pada tahun 2023 rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota di Indonesia hanya sebesar 17,24 persen dari besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing daerah (BPS, 2024). Artinya sebesar 82,76 persen sumber pendapatan pembangunan daerah di kabupaten/kota berasal dari pemerintah pusat yang berasal dari berbagai jenis penerimaan. Proses desentralisasi di Indonesia baru pada tahap desentralisasi dari sisi pengeluaran pemerintah dan belum sampai pada tahap desentralisasi dari sisi penerimaan. Sehingga sebagian besar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunannya yang tercermin dalam besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan yang ditransfer dari pusat ke daerah dalam beberapa skema (Brodjonegoro, 2008). Untuk mengatasi dua persoalan tersebut, baik masalah sosial politik maupun ekonomi, maka agar pelaksanaan otonomi daerah mampu menjadi instrumen pemerintah bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat maka kegiatan kerjasama antar daerah dapat dijadikan solusi (Keban, 2010, Brodjonegoro, 2008).

Hadirin yang saya hormati.

Dalam banyak hal pelaksanaan otonomi daerah justru menimbulkan **ironi**. Pelaksanaan otonomi daerah sering melahirkan semangat ego daerah. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan pelayanan publik, tidak semua hal bisa dilokalisir secara geografis di masing-masing daerah. Misal pengelolaan sungai tidak bisa diatur sepenggal-sepenggal di masing-masing daerah. Pengelolaan sungai harus mengikuti Daerah Aliran Sungai (DAS) yang pengeloalannya melibatkan beberapa daerah otonom secara konsisten dan sinergis. Pelayanan transportasi umum tidak mungkin dikelola sendiri oleh masing-masing daerah, karena mobilitas barang dan manusia terjadi lintas daerah. Penyediaan saluran irigasi, drainase dan pembuangan limbah juga bersifat lintas daerah. Bahkan, aktivitas ekonomi seringkali justru berkembang di perbatasan dua daerah otonom.

Di Indonesia, pelaksanaan otonomi daerah menggunakan paradigma “**Manajemen Pembangunan Daerah**” yaitu membangun daerah berdasarkan batas-batas wilayah administratif semata. Kondisi ini sebenarnya tidaklah tepat, mengingat banyak daerah (kabupaten/kota) yang ditetapkan sebagai daerah otonom memiliki potensi sumberdaya ekonomi dan sosial yang beragam.

Pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan paradigma ini akan menciptakan terjadinya *back-wash effect* (Myrdall, 1957), yaitu suatu kondisi dimana wilayah yang lebih maju dapat menciptakan keadaan yang menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang. Oleh karena itu, Paradigma pembangunan harus diubah dengan menggunakan pendekatan “**Manajemen Pembangunan Wilayah**” yaitu membangun daerah berbasis wilayah (kawasan). Artinya daerah dibangun tidak sekedar berbasis batas wilayah administratif tetapi berbasis kawasan yaitu bersifat lintas wilayah administratif. Pembangunan daerah dengan menggunakan pendekatan ini akan dapat menciptakan kondisi yang oleh Myrdall (1957) disebut sebagai *spread effect*, yaitu suatu kondisi dimana wilayah yang lebih maju menciptakan keadaan yang mendorong perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang. Dalam konteks ini, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat lebih berhasil dibutuhkan adanya kerja sama antar daerah. Tanpa adanya kerja sama antar daerah, kinerja pembangunan ekonomi dan pelayanan publik tidak akan berjalan secara optimal. Tanpa kerja sama antar daerah penyelenggaraan otonomi daerah tidak akan bisa berjalan secara optimal. (Pratikno, 2007).

Olberding (2002) menyebutkan untuk mengembangkan suatu wilayah ada dua pilihan yang dapat dilakukan yaitu; (1) antar daerah saling berkompetisi atau (2) antar daerah saling berkolaborasi. Apabila saling berkompetisi yang menjadi pilihan, maka akibatnya daerah yang unggul dalam berkompetisi akan menjadi lebih maju, sedangkan daerah yang kalah berkompetisi akan menjadi terbelakang atau mati, atau bahkan daerah yang saling berkompetisi akan dapat mati dua-duanya. Namun, apabila pilihannya adalah berkolaborasi, maka daerah yang saling bekerjasama akan dapat maju atau berkembang secara bersama-sama. Dalam konteks Indonesia, menurut saya, kalau kita ingin mengembangkan suatu wilayah atau kawasan, pilihan paling moderat adalah antar daerah harus saling berkolaborasi atau bekerja sama dan bukan saling berkompetisi. Oleh karena itu, dalam perspektif “manajemen pembangunan wilayah”, kerja sama antar daerah menjadi pilihan penting apabila kita ingin mengembangkan suatu kawasan atau wilayah.

Hadirin yang saya hormati.

Setiap daerah memiliki batas wilayah administratif yang ditentukan secara formal melalui peraturan perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas-batas wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, maka alasan utama diperlukan kerja sama antar pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama (Keban, 2010). Melalui kerja sama antar daerah, ego daerah yang

merugikan masyarakat dalam pelayanan publik dan pembangunan ekonomi bisa diminimalisir. Melalui kerja sama antar daerah inovasi-inovasi dari masing-masing daerah bisa saling dipertukarkan dan dikerjakan bersama-sama (Pratikno, 2007).

Dari perspektif ekonomi, apabila menginginkan pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik maka proses desentralisasi tidak cukup hanya pada tataran desentralisasi administratif namun harus sampai pada tataran desentralisasi ekonomi dengan cara memperkuat skala ekonomi daerah. Dengan skala ekonomi daerah yang kuat aktivitas perekonomian akan menjadi meningkat. Meningkatnya aktivitas perekonomian akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk memperkuat skala ekonomi bagi daerah yang perekonomiannya kecil dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan daerah lain (Brodjonegoro, 2008). Dengan demikian, kerjasama antar daerah dapat dipandang sebagai "perahu penyelamat" pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karena itu, dimasa depan, kerja sama antar daerah haruslah dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak terelakkan sehingga harus ada upaya yang sistimatis dan berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk memperkenalkan, mendorong dan menginstitutionalisasikan kerja sama antar daerah agar pemerintah daerah terbiasa melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya (Keban, 2010).

Hadirin yang saya hormati.

Pelaksanaan kerja sama antar daerah tidak hanya marak terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di belahan dunia yang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah menjadi strategi pengelolaan berbagai tantangan dan peluang di setiap kawasan. Tabel berikut menunjukkan kerjasama antar daerah yang terjadi di berbagai negara.

Tabel 1. Nama Lembaga Kerjasama Antar Daerah di Luar Negeri

No	Nama Lembaga	Lingkup Wilayah dan Keanggotaan Daerah	Bidang Yang Dikerjasamakan
1.	<i>South African Local Government Association</i> (SALGA) di Afrika Selatan	Afrika Selatan: Seluruh Kota di Afrika Selatan	Pemberian pelayanan berbagai bidang dan sebagai Intertest Grup dari kepentingan daerah terhadap pemerintah pusat
2.	<i>Sound Transit</i> di Washington	Washington: King County, Snohomish County, dan Pierce County.	Transportasi Publik
3.	<i>The Local Autonomy Act</i> (LAA) di Korea Selatan	Korea Selatan: merupakan asosiasi dari pemerintah lokal	Mengelola konflik yang terjadi antar pemerintah daerah
4.	<i>League of Cities of the Philippines</i> (LCP) di Filipina	beranggotakan 117 kota	Memberikan pelayanan administratif dan pelayanan teknis serta terlibat dalam perumusan kebijakan berkait dengan pemerintahan kota.

Sumber: Mas'udi, Hanif dan Bayo, 2007.

Praktek baik pelaksanaan kerja sama antar daerah ini dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan kerja sama antar daerah di Indonesia. Lalu bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja sama antar daerah di Indonesia? Kegiatan kerjasama antar daerah sebagai upaya mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, diakui dan dianggap penting oleh pemerintah sehingga pemerintah perlu mengatur pelaksanaannya dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini kegiatan kerja sama antar daerah mendapatkan legitimasinya. Sehingga di era tahun 2005 – 2010 an pelaksanaan kerja sama antar daerah kabupaten/kota di Indonesia menjadi “trend”, dan hampir di setiap daerah kabupaten/kota di Indonesia pada saat itu melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota yang lain, baik dengan format kerja sama dalam bentuk asosiasi antar kabupaten/kota maupun kerjasama regional antar daerah otonom dalam satu kawasan. Berikut lembaga kerja sama antar daerah yang pernah ada di Indonesia.

Tabel 2. Nama Lembaga dan Format Kelembagaan Kerja Sama Antar Daerah dalam Bentuk Asosiasi antar daerah di Indonesia

No	Format Kelembagaan	Nama Lembaga	Lingkup Wilayah dan Keanggotaan Daerah
1.	Asosiasi Antar Daerah	1. APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonsia	Seluruh Pemerintah Kabupaten di Indonesia
		2. APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia)	Seluruh Pemerintah Kabupaten di Indonesia
		3. ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia)	Seluruh DPRD Kabupaten di Indonesia
		4. ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia)	Seluruh DPRD Kota di Indonesia
		5. APPSI (Asisiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia)	Seluruh Pemerintah Provinsi di Indonesia

Sumber: Haryanto dan Hanif, 2007.

Tabel 3. Nama Lembaga dan Format Kelembagaan Kerja Sama Antar Daerah dalam Bentuk Kerjasama Regional dan Sektoral di Indonesia

No	Format Kelembagaan	Nama Lembaga	Lingkup Wilayah dan Keanggotaan Daerah
2.	Kerjasama Regional dan Sektoral	1.BKSAD Jabodetabek	Prov. DKI Jakarta; Prov. Jabar meliputi: Kabupaten & Kota Bogor; Kabupaten & Kota Bekasi, Kota Depok; Prov. Banten meliputi: Kabupaten & Kota Tangerang
		2.BARLINGMASCAKEB	Prov. Jateng meliputi: Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen
		3.Kartamantul	Prov. DIY meliputi: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Bantul
		4.Subosukawonosraten	Prov. Jateng meliputi: Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten
		5.Sampan	Prov. Jateng meliputi: Kabupaten Brebes, Kota & Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota & Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang
		6.Java Promo	Prov. DIY meliputi: Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul; Prov. Jateng meliputi: Kabupaten Klaten, Boyolali, Kota & Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen
		7.Gerbangkertosusilo	Prov. Jatim meliputi: Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Kota Surabaya & Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, dan Lamongan
		8. Lake Toba	Prov. Sumut meliputi: Kabupaten Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun, Karo, Dairi, Toba Samosir, dan Humbang Hasundutan

Sumber: Sukmajati, (2007), dan Abdurahman, (2009)

Tabel 3. Lanjutan

No	Format Kelembagaan	Nama Lembaga	Lingkup Wilayah dan Keanggotaan Daerah
2	Kerjasama Regional dan Sektoral	9. Jonjok Batur	Prov. NTB meliputi: Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur
		10. Pawonsari	Prov. Jatim meliputi Kabupaten Pacitan Prov. Jateng meliputi Kab.Wonogiri Prov. DIY meliputi Kab. Gunung Kidul (Wonosari)
		11. Kedungsepur	Prov. Jateng meliputi Kabupaten Kendal, Demak, Ungaran (Kab. Semarang), Kota Semarang, dan Purwodadi (Kab. Grobogan)
		12. Janhiangbong	Prov. Bengkulu meliputi: Kabupaten Kepahiang, Lebong, dan Rejang Lebong
		13. Kaukus Setara Kuat	Prov. Bengkulu meliputi: Kab. Kaur, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara; Prov. Sumsel meliputi: Kab.OKU Selatan; Prov. Lampung meliputi: Kabupaten Lampung Barat
		14. Andalan Kawasan Selatan Sulawesi Selatan	Prov. Sulsel meliputi: Kab. Bantaeng, Bulukumba, Jeneponto, Selayar, dan Sinjai
		15. Wanua Mappatuo	Prov. Sulsel meliputi: Kab. Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo
2.	Kerjasama Regional dan Sektoral	16. Pulau Sumbawa	Prov. NTB meliputi: Kab.& Kota Bima, Kab.Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat
		17. Kawasan Terpadu Teluk Tomini	Prov. Sulteng meliputi: Kab.Banggai Kepulauan, Banggai, Tojo Una Una, Poso, dan Parigi Moutong; Prov. Gorontalo meliputi: Kab.Phuwato, Boalemo, Bone Bolango, Kab.& Kota Gorontalo; Prov. Sulut meliputi: Kab.Bola
		18. Kawasan Terpadu Teluk Bone	Prov. Sulsel meliputi: Kabupaten Selayar, Bulukumba, Sinjai, Bone, Wajo, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo Prov. Sulrameliputi: Kabupaten Kolaka Utara, Kolaka, Bombana, Buton, Muna, dan Kota Bau Bau
		19. Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat	Prov. Kalbar meliputi: Kab.Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau, Sambas, dan Bengkayang
		20. Perbatasan Kawasan Nusa Tenggara Timur	Prov. NTT meliputi: Kab.imor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Belu, dan Rotendau
		21. Kawasan Teluk Papua Barat	Prov. Papua Barat meliputi: Kab.Fakfak, Sorong Selatan, Kaimana, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama

Sumber: Sukmajati, (2007), dan Abdurahman, (2009)

Hadirin yang saya hormati.

Banyaknya kabupaten/kota di Indonesia yang melakukan kegiatan kerja sama antar daerah menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama antar daerah dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai

isu yang dihadapi pemerintah daerah di tingkat kawasan. Berbagai penyelesaian permasalahan yang dapat dikerjasamakan antar lain:

a. Kerja sama dalam Penyediaan Pelayanan Publik.

Meskipun tidak selalu sama, setiap daerah otonom hampir memiliki potensi dan permasalahann pelayan publik yang relatif sama. Oleh karena itu, apabila menangannya diintegrasikan antar daerah hasilnya akan menjadi lebih efektif dan efisien. Penyelesaian permasalahan yang dapat dikerjasamakan dalam penyediaan pelayan publik antara lain:

1. Kerja sama Penyediaan pelayan umum. Misalnya penyedian layanan air bersih antar daerah yang meiliki sumberdaya air yang melimpah dengan daerah yang relatif terbatas sumberdaya air bersihnya.
2. Kerja sama Pembinaan SDM. Dengan otonomi daerah, pembinana SDM daerah tidak sepenuhnya relevan mahal. Oleh karena itu, salah satu alternatif untuk megatasinya dengan cara kerjasam antar daerah dalam pembinaan SDMnya.
3. Kerja sama Inovasi Manajemen dan Teknologi. Dalam banyak kasus ada daerah yang memiliki kemampuan SDM yang baik dengan dukungan universitas dan lembaga riset yang baik, sedangkan daerah lain tidak memilikinya. Sehingga saling berbagi pengalaman dan inovasi antar daerah dapat menjadi sarana untuk saling bekerjasama antar daerah.
4. Kerja sama Pelayanan Darurat. Antar daerah dapat membangun kerjasama dalam menangani keadaan darurat seperti: banjir, kebakaran, pengungsi dan lain-lain.

b. Kerja sama dalam Pengembangan Ekonomi.

Wilayah pengembangan ekonomi tidak identik dengan wilayah administrasi pemerintahan. Pengembangan ekonomi suatu wilayah seringkali mencakup bagian dari beberapa wilayah otonom. Untuk mengembangkan wilayah dengan karakteristik seperti itu maka kerjasama antar daerah menjadi solusi untuk mengembangkannya.

c. Kerja sama dalam Pengelolaan Lingkungan.

Wilayah pelestarian lingkungan juga tidak selalu sama dengan wilayah administrasi pemerintahan. Misalnya Daerah Aliran Sungai (DAS) selalu melintasi beberapa daerah kabupaten atau provinsi. Oleh karena itu pengelolannya perlu membutuhkan kerjasama antar daerah.

Hadirin yang saya hormati.

Pada tataran lokal, hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada lembaga kerjasama antar daerah “BARLINGMASCAKEB” yaitu kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen dalam meningkatkan skala ekonomi

daerah menunjukkan hasil yang positif. Berdasarkan analisis *game theory* dan analisis biaya transaksi kebijakan pembentukan lembaga kerja sama antar daerah BARLINGMASCAGEB merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan skala ekonomi daerah di lima kabupaten yang bekerja sama, dibandingkan apabila masing-masing daerah mengembangkan skala ekonomi daerahnya secara sendiri-sendiri (Harsanto, 2012). Namun demikian, meskipun kerja sama antar daerah dapat mengatasi permasalahan bersama yang dihadapi oleh masing-masing daerah, seiring dengan berjalannya waktu, semangat bekerjasama antar daerah mulai mengalami penurunan. Dari sekian banyak lembaga kerja sama antar daerah yang terbentuk tinggal beberapa kerja sama antar daerah yang masih eksis, diantaranya kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo dalam pengelolaan Terminal Purabaya Bungurasih dan Kerja sama Antar daerah “Kartamantul” yaitu kerjasama antar daerah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan kabupaten Bantul dalam pengelolaan sampah perkotaan dengan intersitas kegiatan yang semakin menurun. Sedangkan lembaga kerjasama antar daerah yang lainnya mengalami mati Suri untuk tidak menyebut kata “bubar”. **Pertanyaannya mengapa kerjasama antar daerah yang secara konseptual dapat meningkatkan skala ekonomi wilayah, mengurangi terjadinya eksternalitas dan dapat mengurangi terjadinya ego dan konflik antar daerah, serta telah dipraktekkan di banyak negara sulit diimplementasikan di Indonesia?**

Hadirin yang saya hormati.

Kerja sama antar daerah menciptakan regionalisasi. Pengertian regionalisasi diartikan sebagai proses pembentukan *region* yang melibatkan beberapa daerah otonom, khususnya kabupaten/kota, baik di dalam satu provinsi maupun antar provinsi. Ada dua paradigma yang biasa digunakan dalam melakukan proses regionalisasi, yaitu paradigma sentralistik dan desentralistik. Menurut Abdurahman (2009), pada pemanfaatan paradigma sentralistik, regionalisasi dapat digambarkan sebagai proses terbentuknya suatu pewilayahan yang terdiri dari beberapa daerah administratif yang memiliki relevansi pada aspek geografis atas perintah (*ex mandato*) struktur hirarkis yang berwenang, contoh regionalisasi pada bentuk ini adalah terbentuknya kabupaten baru atau provinsi baru yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pada regionalisasi desentralistik, pelaksanaannya lebih bersifat kompleks. Karena pembentukannya berasal dari inisiatif lokal, maka sejak dari mulai ide pembentukan, perencanaan sampai implementasinya sangat dibutuhkan adanya peran serta dari masing-masing pemerintah lokal. Karena tujuan dari pembentukan regionalisasi desentralistik adalah untuk mengoptimalkan hasil pembangunan wilayah dengan cara lebih mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal masing-masing, maka keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kesediaan, komitmen, dan konsensus bersama antar pemimpin daerah otonom yang terlibat. Kerjasama antar daerah yang banyak terbentuk di Indonesia

sebagaimana tercantum dalam tabel 2, merupakan hasil dari regionalisasi desentralistik. Kerja sama antar daerah tersebut merupakan kerja sama antara pemerintah daerah otonom yang bersifat sukarela yang dibentuk dari bawah atas kesadaran dari para anggotanya, dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan bersama antar daerah yang terlibat baik dalam bidang peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi wilayah maupun pengelolaan masalah lingkungan yang saling menguntungkan.

Mengapa kerja sama antar daerah sebagai hasil dari regionalisasi desentralistik sulit untuk bisa bertahan dalam menjalankan kegiatannya. Hal ini disebabkan sulitnya mencapai dan mempertahankan kerjasama sukarela antara sejumlah besar daerah **tanpa adanya otoritas yang terpusat** (Axelrod 1997), konsep ini biasa disebut sebagai "**dilema tindakan kolektif**". Dalam bekerjasama antar daerah perlu melakukan tindakan bersama secara kolektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Namun, karena masing-masing daerah yang bekerja sama merupakan daerah otonom yang setingkat, maka setiap tujuan yang hendak dicapai diputuskan melalui mekanisme musyawarah antar anggota, dan hal ini membutuhkan waktu yang panjang sampai pada tahapan eksekusinya. Idealnya setiap organisasi seperti lembaga kerja sama antar daerah apabila ingin bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan haruslah memiliki pemimpin yang kuat serta memiliki otoritas dalam membuat keputusan secara terpusat. Namun, karena setiap kepala daerah dari daerah otonom yang bekerjasama memiliki kekuasaan yang setingkat, maka setiap pengambilan keputusan yang dibuat harus dikompromikan kepada setiap kepala daerah anggota, dan setiap daerah yang bekerjasama memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. "**Ketiadaan otoritas yang terpusat**" ini menjadi faktor utama penghambat keberhasilan dan keberlanjutan dari kerja sama antar daerah yang dibentuk.

Faktor lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa lembaga kerja sama antar daerah di Indonesia tidak berjalan dengan baik dikemukakan oleh Olson (1971). Menurut Olson faktor penting bagi keberhasilan suatu tindakan kolektif (seperti yang dijalankan oleh lembaga kerja sama antar daerah) adalah bergantung pada ukuran (*size*), homogenitas (*homogeneity*) dan tujuan kelompok (*porpuse of the groups*). Menurut Olson suatu tindakan kolektif akan bekerja secara optimum tergantung pada ketiga determinan tersebut. Secara hipotetik, semakin besar ukuran suatu kelompok kepentingan maka akan semakin sulit bagi kelompok tersebut menegosiasikan kepentingan diantara anggota kelompok, demikian sebaliknya. Artinya kelompok yang dibangun dengan ukuran yang kecil akan bekerja lebih efektif. Keragaman anggota kelompok juga sangat berpengaruh terhadap efektivitas tindakan kolektif. Semakin beragam kepentingan anggota kelompok maka akan semakin sulit memformulasikan kesepakatan bersama karena masing-masing anggota membawa kepentingannya sendiri-sendiri, demikian juga sebaliknya. Tujuan kelompok harus dibuat secara fokus dengan

memperhatikan kepentingan semua anggota. Tujuan kelompok yang luas, di samping kabur juga akan memecah kesatuan antar anggota sehingga dukungan terhadap tindakan kolektif menjadi lemah.

Dengan mengambil kasus pada lembaga kerja sama antar daerah di Indonesia, hampir semuanya dibentuk dengan jumlah anggota yang cukup banyak. Banyaknya anggota dari masing-masing lembaga kerja sama antar daerah mengharuskan mengakomodir banyak kepentingan dan banyak tujuan sehingga semakin sulit memformulasikan setiap kepentingan dan tujuan dari masing-masing anggota.

Hadirin yang saya hormati.

Lalu bagaimana agar lembaga kerja sama antar daerah dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dari berbagai kajian tentang pelaksanaan kerja sama antar daerah di Indonesia, termasuk kajian mengenai pelaksanaan kerja sama antar daerah BARLINGMASCAKEB yang dilakukan oleh penulis dapat diidentifikasi bahwa kerjasama antar daerah dapat terbentuk dan berjalan dengan baik diperlukan adanya beberapa prasyarat tertentu, yaitu; **Pertama**, kerja sama antar daerah harus dilandasi adanya suatu **kebutuhan bersama** diantara para anggota. Dianggap sebagai kebutuhan bersama apabila masing-masing pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang dihadapainya seperti pengentasan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, konflik antar penduduk, dan lain-lainnya, kalau mereka tidak bekerjasama. Oleh karena itu, identifikasi untuk menemukan kesamaan isu dan permasalahan pembangunan diantara anggota menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan (Tarigan, 2012). **Kedua**, adanya **komitmen bersama** dari masing-masing pemerintah daerah dalam menangani isu-isu yang telah disepakati, dan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibanding kepentingan masing-masing daerah. **Ketiga**, adanya **prinsip saling menguntungkan** bagi semua pihak yang bekerjasama. Prinsip saling menguntungkan menggambarkan bahwa dalam bekerjasama setiap anggota harus dapat menarik manfaat dari adanya kerjasama tersebut. Namun demikian, tidak berarti bahwa setiap daerah harus mendapatkan bentuk keuntungan yang seragam. Kerja sama tidak dimaksudkan untuk membuat keseragaman antar daerah, melainkan melakukan pengembangan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayah masing-masing. **Keempat**, adanya **dukungan dari pemerintah** (baik pusat maupun provinsi) terhadap kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dukungan dapat berupa bantuan pendanaan maupun penyediaan aturan perundangan sebagai dasar hukum untuk melakukan kerjasama antar daerah. Hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap pelaksanaan kerja sama antar daerah “BARLINGMASCAKEB” menunjukkan bahwa meskipun untuk meningkatkan skala ekonomi daerah masing-masing anggota lebih menguntungkan apabila dilakukan kerjasama antar ke lima kabupaten

anggota yang bekerja sama, tetapi dengan berjalannya waktu efektivitas dari tujuan kerjasama yang dibentuk semakin memudar bahkan kemudian bubar.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan ini disebabkan berlakunya konsep “**dilema tindakan kolektif**” dalam lembaga kerja sama ini. Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan kerjasama antar daerah ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Terlalu banyaknya pemerintah daerah yang tergabung dalam kerjasama ini (ada 5 kabupaten) menjadikan permasalahan sendiri dalam menegosiasikan semua kepentingan dari masing-masing kabupaten anggota. Sebagaimana dikemukakan oleh Olson (1971), bahwa semakin besar ukuran kerja sama yang dibentuk akan menjadi semakin tidak efektif. (2) Karena anggota kerja sama antar daerah ini cukup besar menyebabkan keberagaman kepentingan anggota kelompok semakin besar sehingga akan semakin sulit memformulasikan kesepakatan bersama karena masing-masing anggota membawa kepentingannya sendiri-sendiri. (3) Lembaga kerjasama antar daerah ini memiliki tiga tujuan yaitu; meningkatkan perdagangan (*trade*) produk pertanian antar anggota, (2) memfasilitasi masuknya investasi (*investment*) ke lima kabupaten anggota; dan (3) melakukan pengembangan pariwisata regional (*regional tourism*). Semakin luas tujuan yang hendak dicapai membuat kabur fokus tujuan bersama karena setiap anggota memiliki kepentingan yang berbeda terhadap masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. (4) Menurunnya komitmen dari para kepala daerah kabupaten anggota terhadap keberlangsungan dari lembaga kerja sama antar daerah. Komitmen menurun karena terjadi pergantian kepemimpinan di kabupaten anggota dan pada kepala daerah baru tidak merasa harus memenuhi setiap keputusan yang dibuat oleh kepala daerah yang digantikan berkenaan dengan kegiatan kerjasama antar daerah. (5) Dukungan dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terhadap keberlangsungan kerja sama antar daerah kurang.

Kurangnya dukungan tercermin dari tidak adanya pemberian alokasi anggaran dari pemerintah baik pusat maupun provinsi untuk mendukung kegiatan kerjasama antara daerah. Anggaran operasional diperoleh dari iuran para anggota. Namun, cara ini punya kelemahan dimana dalam pertanggungjawabannya setiap uang yang berasal dari kabupaten A misalnya, tidak boleh peruntukannya digunakan untuk kegiatan di kabupaten B, C atau D. Untuk mengatasinya iuran anggota disalurkan melalui mekanisme dana hibah. Hanya kelemahannya dana hibah dari suatu kabupaten tidak boleh diberikan setiap tahun secara rutin untuk kegiatan yang sama, sehingga hampir di setiap lembaga kerja sama antara daerah mengalami kekurangan anggaran untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang telah diprogramkan. Kurangnya dukungan dari pemerintah juga terlihat dari tidak pernah dilakukannya kegiatan Monitoring dan evaluasi kegiatan kerja sama antar daerah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Hadirin yang saya hormati.

Meskipun kerjasama antar daerah mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya, namun dalam prakteknya dapat mengurangi dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah seperti munculnya ego daerah, timbulnya eksternalitas, konflik antar penduduk maupun antar pemerintah daerah. Oleh karena itu, agar pelaksanaan otonomi daerah dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan dibutuhkan adanya kerja sama antar daerah. Untuk itu diperlukan adanya strategi kerja sama antar daerah yang berkelanjutan untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Strategi yang harus diterapkan agar kegiatan kerja sama antar daerah dapat berjalan secara berkelanjutan maka harus bisa menghilangkan berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan kerja sama antar daerah tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, saya ingin mengusulkan strategi yang bisa dilakukan dalam bentuk dua pilihan.. **Pertama**, untuk mengatasi munculnya “**Ketiadaan otoritas yang terpusat**” yang oleh Axelrod (1997), disebut sebagai dilema tindakan kolektif dalam kegiatan kerja sama antar daerah maka otonomi daerah yang saat ini diberikan di tingkat kabupaten/kota perlu digeser dan diberikan di tingkat provinsi. Dengan adanya otonomi daerah di tingkat provinsi, maka pelaksanaan program pembangunan dan kegiatan pelayanan publik yang bersifat lintas batas wilayah atau membutuhkan adanya kerjasama antar daerah kabupaten/kota akan dikendalikan oleh gubernur sebagai kepala daerah provinsi. **Kedua**, apabila pemberian otonomi daerah di tingkat provinsi tidak memungkinkan, karena alasan politik misalnya, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengaktifkan kembali lembaga Badan Koordinator Lintas Wilayah (Bakorwil) dengan diberi kewenangan dan memiliki otoritas yang kuat untuk mengatur kegiatan kerja sama antar daerah. (2) perlu dilakukan perubahan mindset (cara berfikir) bagi para pimpinan daerah kabupaten/kota terhadap pemahaman kerja sama antar daerah. Kerja sama antar daerah bukan semata dipandang sekedar sebagai hak tetapi menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah. Keberhasilan dalam bekerja sama dengan daerah lain perlu dijadikan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Bagi daerah yang menjalankan kegiatan kerja sama antar daerah dan berhasil perlu diberikan **insentif dari pemerintah pusat** bagi daerah yang menjalankannya. Seperti pemberian penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwiyata dan lain sebagainya yang selama ini diberikan sebagai apresiasi terhadap pemerintah daerah yang telah berhasil melakukan pembangunan pada bidang-bidang tertentu. (3) Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan lebih bagi pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam bentuk **pemberian bantuan pendanaan yang bersifat kontinyu, dukungan peraturan perundang-undangan dan kegiatan monitoring dan evaluasi** dari pemerintah provinsi.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagai penutup pidato ini, saya menarik kesimpulan bahwa kerja sama antar daerah sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan kebijakan otonomi daerah di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, agar kegiatan kerja sama antar daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dibutuhkan beberapa pilihan strategi yang bisa diterapkan yaitu; **Pertama**, tempatkan pelaksanaan otonomi di tingkat provinsi tidak di kabupaten/kota. **Kedua**, Pelaksanaan otonomi daerah tetap di kabupaten kota, namun perlu melakukan perubahan mindset bagi para kepala daerah kabupaten/kota bahwa melakukan kerja sama antar daerah menjadi salah satu kewajiban dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan daerah yang disertai dengan pemberian pendanaan yang mencukupi, dukungan peraturan perundang-undangan dan pemberian insentif yang menarik bagi setiap daerah kabupaten kota yang berhasil melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah serta mengaktifkan kembali lembaga “Badan Koordinasi Lintas Wilayah” (Bakorwil) sebagai lembaga perwakilan dari pemerintah provinsi yang salah satu tugasnya melakukan koordinasi, supervisi dan fasilitasi kegiatan kerja sama antar daerah kabupaten/kota di lingkup wilayahnya.

Hadirin yang berbahagia,

Dalam majelis yang mulia ini, sebelum mengakhiri pidato ini, ijinkan lah saya mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah menetapkan saya dalam jabatan guru besar bidang Manajemen Pembangunan Wilayah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman terhitung mulai tanggal 1 September 2024.
2. Rektor Universitas Jenderal Soedirman Prof. Dr. Ir. Akhmad Sodik, M.Sc, Agr, beserta jajaran pimpinan universitas yang telah membantu segala proses pengusulan hingga pengukuhan guru besar saya.
3. Ketua dan anggota Senat Universitas Jenderal Soedirman, Ketua dan anggota senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mengawal memproses pengusulan guru besar saya sampai ke tingkat kementerian sehingga layak untuk dilakukan penilaian.
4. Kepala Biro, Kordinator Tata Usaha baik di tingkat universitas dan fakultas beserta staf yang telah bersedia untuk bersusah payah membantu pengurusan kelengkapan administrasi usulan guru besar saya.

5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prof. Dr. Wahyuningrat, dan Para wakil dekan, Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si., Prof. Dr. Mite Setiansah dan Dr. Tyas retno Wulan yang telah memberikan dorongan yang tidak ada hentinya yang terus menyemangati agar saya bisa meraih jabatan guru besar.
6. Bapak ibu tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya kepada mba Puji, mbak Atin, pak Kamsir, pak Erwin Sunaryo, dan seluruh tim kepegawaian universitas yang telah membantu memproses usulan kenaikan pangkat guru besar saya hingga berhasil.
7. Ketua LPPM Unsoed beserta jajarannya yang telah memfasilitasi pemberian dana penelitian kepada saya sehingga berujung pada luaran dalam bentuk publikasi ilmiah internasional bereputasi sebagai syarat pengusulan guru besar saya.
8. Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, MS, rekan, teman sejawat, sahabat dan kakak kelas saya saat kuliah di S1 dulu yang selalu memberikan dorongan dan semangat agar saya senantiasa mempublikasikan hasil karya ilmiah saya ke dalam jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi sehingga dapat mengantarkan saya menjadi guru besar. Beliaulah yang pertama kali menelepon saya bahwa usulan guru besar saya diterima oleh kementerian.
9. Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si. dan Dr. Mohammad Yamin yang secara khusus memberikan pendampingan yang tak henti-hentinya selama proses pengusulan guru besar saya.
10. Teman-teman dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terima kasih atas doa dan dukungan dalam pengembangan karir akademik saya.
11. Bapak ibu teman-teman dosen khususnya di Jurusan Administrasi publik, kepada Prof. Dr. Paulus Israwan Setyoko, M.S, Drs. Guntur Gunarto, Dr. Abdul Rohman, M.Ag. Dr. Ali Rokhman, M.Si., Drs. Darmanto Sahat Satyawan Manurung, M.Kes., M.Si., Dr. Sukarso. M.Si., Drs. Simin, M.Si., Prof. Dr. Muslih Faozanudin. M.Sc. Prof. Dr. Wahyuningrat., M.Si., Dr. Denok Kurniasih., Dr. Alizar Isna, M.Si. Dra. Lilis Sri Sulistiani, M.M., Prof. Dr. Slamet Rosyadi, M.Si. Dr. Tobirin, Dr. Hikmah Nuraini, M.PA. Prof. Dr. Dwiyanto Indiahono, M. Si., Drs. Sendy Noviko, M.PA, Shadu Satwika Wijaya, S.Sos., M.Si., Rizky Amalia Putri, S.H., M.A.P., Titi Rahmawati, S.Sos. , M.Si. Khayu Rohmi, S.A.P., M.A.P. Ranjani, S.Sos., M.P.A., Tissa Silvia, S.Sos., M.A.P., Thahrina Azriah, S. Sos., M.Si. Terimakasih atas dukungan sebagai teman berdiskusi yang baik selama ini sehingga dapat mengantarkan saya pada posisi ini.
12. Teman-teman dosen Fisip dan Jurusan Administrasi Publik yang telah purna tugas Alm Drs. Suhari MJ, Alm. Prof. Drs. Suyatno Wongsokenongo, Alm Prof. Drs. Sumardi, Alm Drs. M. Imron, M.Si., Alm Drs. Suparman Suparjo, M.Si., dan Alm Dra. Duswati, M.Si. Dr. Anwaruddin, M.Si., Drs. Mahmud Setiahad, M.Si., Drs. Swastha Dharma, M.Si., Drs. Pawrtha Dharma, M.Si., Dra. Rukna Idanati, M.Si., Drs. Ngalimun, MPA., Drs. Bambang Widodo,

M.Par., Drs. Bahtarudin., M.Si. Terimakasih atas dukungannya selama ini kepada saya untuk selalu belajar, belajar dan belajar.

13. Bapak dan ibu guru saya di SD N Sragi III Pekalongan, SMP Negri Sragi Pekalongan, SMP N III Purworejo dan SMA N Purworejo. Bapak dan ibu dosen saya di Jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM, Program Pascasarjana Administrasi Negara UGM dan Program Doktor Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesan IPB. Terimakasih atas bekal ilmu pengetahuan yang telah saya terima.
14. Sahabat-sahabat saya alumni SDN Sragi III angkatan tahun 1973, alumni SMPN Sragi angkatan tahun 1976, alumni SMP III Purworejo angkatan tahun 1976, alumni kelas IPS 1 SMAN Purworejo, Alumni jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM tahun 1980, alumni Program Pascasarjana Administrsi Negara UGM tahun 1994 dan alumni program Doktor PWD IPD angkatan tahun 2007. Terimakasih atas kebersamaannya selama ini dan telah banyak memberi inspirasi kepada saya untuk menekuni pekerjaan saya sebagai dosen.
19. Warga perumahan Teluk khususnya RT 02 RW IX khususnya Pak Kresnawan, Pak Sugeng dan pak Singgih yang hadir pada saat ini.
20. Keponakan saya, mas Rizal Fanani dan mbak Dyah, mas Dimas Prasetyo dan mbak Icha, mbak Kiki, mas Kaka, dik Fian, dik Hanung, dik Rani dan dik Raihan, dik Faris, dik Fatin, dik Abduh, mas Rama, mas Yudit, dik Wulan dan dik Bulan, mas Ofik dan mas Ofan, Terimakasih atas doanya.
22. Kakak- kakak dan adik-adik tercinta, almarhum mas Eko Ariyanto dan mbak Utri, Mbak Dewi Retnaningsih dan almarhum mas Subandi, almarhumah dik Yuniarti Susilaningsih dan dik Bambang Supriyanto, dik Bambang Widianto dan dik Fitri, mas Yoyok Kushandoyo dan mbak Wiwik, Om Sutejo Prabowo dan dik Tien, tante Herwati, dan dik Wuryanto dan dik Dian. Terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini.
23. Pakde Koeshadi, Bude Koeshadi (Sutarti) dan bude Suyati, orang tua ke tiga saya. Terimakasih atas didikan dan bimbingan beliau-beliau sehingga saya bisa berdiri di depan sidang yang terhormat ini.
24. Bapak dan ibu mertua, orang tua kedua saya, bapak Drs. Buat watino, M.Si. dan ibu siti Susijah, yang telah memberikan doa, perhatian, dan kasih sayang kepada saya, yang selalu mendampingi saya di saat-saat sulit. Maturnuwun mbah.
25. Anak-anak ku tercinta Dyah Wahyu Nastiti, M.Sc., Dyah Anggita Rati, S.M. dan Hilda Kurnia Setiaji, S.M. yang tidak pernah lelah mendoakan, memberikan dukungan, dan menyemangati serta menghibur bapaknya di saat suka maupun duka.

26. Istriku tercinta, Dra. Suwiati, M.Si. yang selalu sabar mendampingi saya baik dalam suka dan duka. Terima kasih atas pengertian, cinta, kasih sayang, dan doa-doamu untuk kemajuan karier saya dan kebahagiaan rumah tangga kita.
27. Terakhir, terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada orang tua saya ayahanda tercinta Almarhum bapak Soeprat Kiswoto dan Ibunda tercinta Almamah ibu S. Karyatun, atas segala limpahan kasih sayang mereka berdua sehingga saya bisa mewujudkan harapan mereka. Doa dan nasihat mereka berdua agar saya tidak lelah untuk menuntut ilmu menjadi pemandu saya hingga saya dapat meraih jabatan Guru Besar. Doa bapak ibu telah terkabul yang menginginkan anaknya bisa bekerja menjadi seorang “guru gede” sebutan lain yang diberikan oleh bapak saya untuk menyebut pekerjaan dosen. Hari ini anakmu sedang dikukuhkan menjadi seorang guru besar. Semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan memberikan tempat yang mulia di sisi-Nya.

Untuk mengakhiri pidato ini, saya sekali mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang membantu terselenggaranya acara pengukuhan ini dan juga kepada kepada hadirin yang telah setia mendengarkan pidato Guru Besar saya. Semoga Allah SWT membalas budi baik ibu bapak hadirin semuanya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan dalam acara pengukuhan Guru Besar saya. Sebagai manusia tentu saya banyak kekurangan. Oleh karenanya, kepada hadirin sekalian saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, Wassalamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokatuh.

Daftar Pustaka

- Abdurahman, Benjamin, 2009, *Pemahaman Dasar Regional Management dan Regional Marketing: Instrumen Strategis Pembangunan Wilayah dan Kota Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi dan Implikasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kerjasama Antar Daerah, Edisi 2.
- Axelrod, R. 1997. *The Complexity of Cooperation: Agent-based Models of Competition and Collaboration*, Princeton, Princeton University Press.
- Brodjonegoro, Bambang P.S., 2008, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Ekonomi*, <http://www.docstoc.com/docs/21470115/Otonomi-Daerah-dan-Desentralisasi-Ekonomi-Otonomi-Daerah-dan-Desentralisasi-Ekonomi>(Tanggal 12 November 2009)
- Badan Pusat Statistik (BPS), 2024, *Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan [Rincian 2022] (Rupiah), 2021-2023*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjE4NiMy/realisasi-penerimaan-pemerintah-kabupaten-kota-seluruh-indonesia-menurut-jenis-penerimaan--rincian-2022-.html>. (Di download pada tanggal 11 januari 2025).

- Harsanto, Bambang Tri, 2012, *Analisis Kinerja Lembaga Kerjasama Antar Daerah dalam Meningkatkan Skala Ekonomi Daerah: Kajian Aspek kelembagaan, Studi Kasus Kerjasama Antar Daerah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Haryanto dan Hanif, *Profil Kerjasama Antar Daerah di Indonesia*, dalam Pratikno, 2007, *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format kelembagaan*, Yogyakarta, Jogja Global Media.
- Hidayat, Syarif, 2008, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif StateSociety Relation", *Jurnal Poelitik*, Volume 1, Nomor 1, Maret, h.1-8.
- Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2013, *Kerjasama Antar Daerah di Bidang Perdagangan Sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah*, Laporan Penelitian.
- Sukmajati, Mada, Wawan Mas'udi, *Format Kelembagaan Kerjasama Antar Daerah di Indonesia*, dalam Pratikno, 2007, *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format kelembagaan*, Yogyakarta, Jogja Global Media.
- Mas'udi, Hanif dan Bayo, *Kerjasama Antar Daerah di Beberapa Negara*, dalam Pratikno, 2007, *Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format kelembagaan*, Yogyakarta, Jogja Global Media.
- Myrdal, Gunnar, 1957, *Economic theory and under-developed regions*, Gerald Dukworth and Co. Ltd.
- Olberding, Julie Cencula, 2002, *Does Regionalism Beget Regionalism? The Relationship between Norms and Regional Partnership for Economic Development*. *Public Administration Review*, Vol. 62, No. 4.
- Olson, Mancur, (2001), *The Logic of Collective Action*, Cambridge : Harvard University Press
- Pratikno, 2007, *Seandainya Otonomi Tanpa Kerjasama: Kerjasama Antar Daerah: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan*. Jogja Global Media. Yogyakarta.
- Regional Management BARLINGMASCAKEB, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Regional Management BARLINGMASCAKEB*, Rencana dan Strategi 2011 – 2013.
- Sjafrizal, 2008, *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Baduouse Media, Padang.
- Tarigan, Antonius, 2012, *Kerjasama Antar Daerah (KAD) Untuk Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dan Daya Saing Wilayah*, Subdit Kelembagaan Pemerintah Daerah, Direktorat Otonomi Daerah Bappenas.
http://bulletin.penataanruang.net/upload/data_artikel/Topik%20Utama%20-20Kerjasama%20Antar%20Daerah%20untuk%20Peningkatan%20Daya%20Saing%20Wilayah-oke.pdf (Di download pada tanggal 3 Mei 2012)

CURRICULUM VITAE



IDENTITAS DIRI

Nama lengkap	: Prof. Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si.
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Tempat dan Tanggal lahir	: Purwodadi Grobogan, 5 Desember 1961
NIP	: 19611205 198702 1 001
Pangkat/Gol.	: Pembina Tingkat I/IVb
Jabatan Fungsional	: Guru Besar
Universitas	: Jenderal Soedirman Purwokerto
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan	: Administrasi Publik
Bidang Keahlian	: Manajemen Pembangunan Wilayah
Agama	: Islam
Status	: Menikah dengan Dra. Suwiati, M.Si. dengan dua anak (Dyah Wahyu Nastiti, S.E., M.Sc. dan Dyah Anggita Rati, S.M.)
Alamat Kantor	: Kampus Fisip Unsoed , Jl. H.R. Bunyamin No. 993 Purwokerto
Alamat Rumah	: Jl. Mahoni VII/No. 94 Perum Teluk Purwokerto Telp. (0281) 626122 Hp. 08122706199
Alamat E-mail	: bambang.harsanto@unsoed.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN SD - SMA

No.	Pendidikan	Nama Sekolah	Tempat	Keterangan
1.	Sekolah Dasar (SD)	SD Negeri Sragi III	Pekalongan	Lulus Tahun 1973
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	SMP negeri III Purworejo	Purworejo	Lulus Tahun 1976
3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	SMA Negeri Purworejo	Purworejo	Lulus Tahun 1980

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

No.	Pendidikan	Jurusan	Universitas	Keterangan
1.	Sarjana Muda	Ilmu Administrasi Negara	Fisipol UGM	Lulus Tahun 1983
1.	Strata 1 (S1)	Ilmu Administrasi Negara	Fisipol UGM	Lulus Tahun 1986
2.	Strata 2 (S2)	Ilmu Administrasi Negara	Pascasarjana UGM	Lulus Tahun 1997
3.	Strata 3 (S3)	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan	Pascasarjana IPB	Lulus Tahun 2012

PENGALAMAN JABATAN

No.	Jabatan	Tahun
1.	Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Unsoed Purwokerto	1997 - 2003
2.	Pembantu Dekan I FISIP Unsoed Purwokerto	2003 - 2007

PENGALAMAN MENGAJAR PRORAM SARJANA (S1)

No.	Mata Kuliah Yang Diampu	Semester
1.	Pengantar Administrasi Publik	1
2.	Manajemen Pengembangan Wilayah	5
3.	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan	6
4.	Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik	3
5.	Teori Organisasi Publik	2

PENGALAMAN MENGAJAR PRORAM MAGISTER (S2)

No.	Mata Kuliah Yang Diampu	Semester
1.	Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah (Magister Ilmu Lingkungan)	1
2.	Metode Penelitian Administrasi (Magister Administrasi Publik)	1
3.	Teori Organisasi dan Aplikasi (Magister Administrasi Publik)	2
4.	Ekonomi Politik Pembangunan (Magister Administrasi Publik)	3
5.	Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Daerah (Magister Administrasi Publik)	2

PENGALAMAN MENGAJAR PROGRAM DOKTOR (S3)

No.	Mata Kuliah Yang Diampu	Semester
1.	Pembangunan Berkelanjutan (Doktor Administrasi Publik)	1

REKOGNISI

- a. Menjadi Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sejak tahun 2014.
- b. Menjadi Asesor Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial, Politik, Administrasi dan Komunikasi (LAMSPAK). Sejak tahun 2024.
- c. Menjadi Asesor Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) FISIP Unsoed. Sejak tahun 2022.

- d. Narasumber FGD Pakar: Kerjasama Daerah dalam Rangka Peningkatan Kualitas Penyediaan Pelayanan Publik di Daerah diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI pada tahun 2024.
- e. Sebagai Narasumber Tenaga Ahli Perencana Wilayah dalam Penyusunan Produk Unggulan Daerah Oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas pada tahun 2024.

PENGALAMAN PENELITIAN

No.	Judul Penelitian	Status Keanggotaan	Tahun Penelitian
1	Dekonstruksi lembaga Kerjasama Antar Daerah: Studi Kasus kerjasama Antar Daerah Barlingmascakeb.	Ketua Peneliti	2013
2	Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Wonosobo.	Ketua Peneliti	2017
3	Pengembangan Sumberdaya Aparatur Pemerintah Desa Berbasis Kompetensi menuju Desa Unggul Mandiri di Kabupaten Banyumas.	Anggota Peneliti	2017
4	Model Kerjasama Antar Desa Dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Banyumas.	Ketua Peneliti	2020
5	Model Kompetensi Kolaborasi Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa Dalam Pengembanagn Kawasan Perdesaan (Studi Pada Pembangunan Kawasan Agrowisata Di Kabupaten Banyumas)	Anggota Peneliti	2022
6	Pengembangan Ekonomi Lokal Melalui Konsep Desa Wisata di Desa Klinting Kabupaten Banyumas	Anggota Peneliti	2023
7.	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Ekowisata di Kawasan Kanigara Melalui Program Pengembangan Kawasan Perdesaaan	Anggota Peneliti	2024

PUBLIKASI ILMIAH

No.	Judul Publikasi	Nama Jurnal	Tahun Publikasi
1.	Format Kelembagaan Kerja sama Antar Daerah untuk pembangunan Ekonomi Kawasan Berkelanjutan	MIMBAR, Vol. 31. No. 1., Juni 2015	2015
2.	Penguatan Kelembagaan Kelurahan Pasca Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 30, No. 2 tahun 2017	2017
3.	Pengaruh Kompetensi, Motivasi, lingkungan Kerja dan Persepsi gaya kepemimpinan terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana	Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Vol. 30, No. 3 tahun 2017	2017
4.	A Semi Autonomous Model to Strengthen the Lowest Bureaucracy: A Case Study in Wonosobo Regency, Central java, Indonesia.	Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 9, No. 3, may 2018	2018
5.	Determinants of Performance of Village Government in Early Implementation of Village Law.	Journal of Governance, Volume 5, Issue 2, December 2020	2020
6.	Building A Rural Economic Area Through Cooperation Between Villages: A Case Study of Agrotourism-Based Rural Area Development in Banyumas Indonesia	Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 10, No 2 (2022)	2022
7.	The role of e-billing and e-SPT implementation on user satisfaction of e-filing taxpayers	International Journal of Data and Network Science (2023)	2022
8	The Competence-Based Development of Village Government Personnel towards Superior and Independent Villages in Banyumas Regency, Indonesia	International Journal of Current Science Research and Review Vol 5 No 2 (2022)	2022
9	Investigating the keys to the failure of inter-village government collaboration in developing rural economic potentials in Indonesia	Regional Science Policy & Practice Vol.: 16, Nomor: 5 Tahun: 2024	2024

Purwokerto, 12 Januari 2025



Prof. Dr. Bambang Tri Harsanto, M.Si.
NIP: 19611205 198702 1 001